

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten selama periode 2010–2024, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Kenaikan UMK dinilai mampu memperbaiki daya beli, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendorong aktivitas perekonomian yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Hasil ini selaras dengan perspektif human capital yang menekankan bahwa peningkatan kompensasi dapat diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja.
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara teoretis pendidikan memiliki kontribusi penting dalam menekan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan lama sekolah belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja berpendidikan belum optimal.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Peningkatan PDRB tidak secara konsisten diikuti oleh penurunan pengangguran, bahkan cenderung menunjukkan arah yang berlawanan. Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena *jobless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih ditopang sektor padat modal dan teknologi dibandingkan sektor padat karya, sehingga peningkatan output tidak sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dinamika pengangguran tidak hanya bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi,

tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja, struktur ekonomi daerah, serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan pada Kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

a. Saran Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan memasukkan indikator lain yang relevan, seperti tingkat inflasi, investasi pemerintah maupun swasta, produktivitas tenaga kerja, dan dinamika sektor industri tertentu. Selain itu, penggunaan data yang lebih panjang dari periode 2010–2024 dapat meningkatkan akurasi estimasi model regresi panel serta memungkinkan analisis tren jangka panjang, fluktuasi ekonomi, dan dampak kebijakan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif. Peneliti juga dapat mempertimbangkan metode panel data yang lebih kompleks, misalnya model dinamis atau model dengan variabel instrumen, untuk menangani potensi endogenitas dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kausal antarvariabel.

b. Saran Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan daerah, khususnya di Provinsi Banten, dalam merumuskan kebijakan terkait ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dapat meninjau dan menyesuaikan UMK agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi lokal serta kapasitas perusahaan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja

melalui program peningkatan RLS. Selain itu, pengembangan sektor unggulan yang dapat meningkatkan PDRB di masing-masing kabupaten/kota akan berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan sistem pengumpulan dan pemutakhiran data ketenagakerjaan, terutama data TPT, agar analisis kebijakan berbasis bukti menjadi lebih valid dan dapat diterapkan secara tepat sasaran. Lebih jauh, kolaborasi dengan akademisi dan lembaga riset lokal dapat membantu memantau efektivitas kebijakan dan melakukan evaluasi secara berkala.